

**LAPORAN**

**EVALUASI INTERNAL**

**PROGRAM DAN KEGIATAN,  
REALISASI ANGGARAN,  
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**TRIWULAN IV**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Evaluasi Internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar Triwulan IV Tahun 2023 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil evaluasi internal Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar penyajiannya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Benteng, 29 Desember 2023

Kepala Dinas PMPTSP,  
  
**Dis. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 198603 1 022

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP .....	1
BAB II EVALUASI	
A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan .....	7
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran .....	10
C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	13
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	
A. Permasalahan .....	15
B. Rekomendasi .....	15
BAB III PENUTUP	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Permen PAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan** pelaksanaan **program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik**.

### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2023;
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan kedepannya.

### **C. Gambaran Umum Dinas PMPTSP**

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

1. Peringkat : B

2. Alamat : Jalan Jend Ahmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
3. Email : [DPMPTSP.selayar@gmail.com](mailto:DPMPTSP.selayar@gmail.com)
4. Titik koordinat : **S** 6,11924, **E** 120,467141
5. Foto kantor

**Gambar 1.1**



## **1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

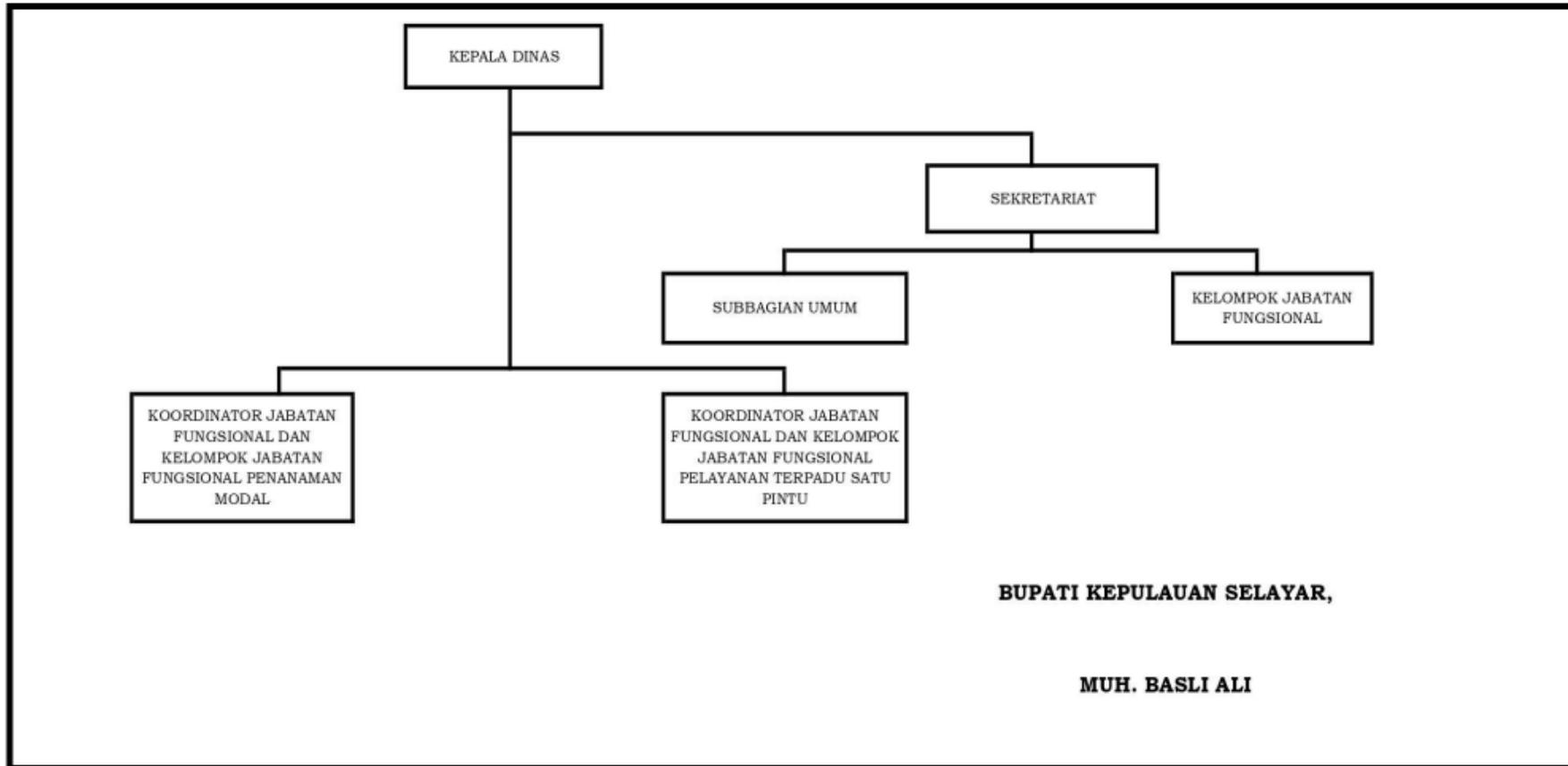
Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
- g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
  - Subbagian Umum
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Gambar 1.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

## 2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2023 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
  - Administrator (Kelas 12) = 1 orang
  - Administrator (Kelas 11) = 3 orang
  - Pengawas = 3 orang
  - Pelaksana = 15 orang
  - Fungsional = 6 orang
- Jumlah = 26 orang**

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

**Tabel 1.1**

Susunan Kepegawaian Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon Per 31 Maret 2023

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	2	-	4	1	2	-	2	5	-	-
2	Strata Satu (S1)	2	11	-	13	-	1	1	11	13	16	-
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	1	3	4	8	-	-	-	7	7	6	-
Jumlah		5	17	4	26	1	3	1	21	26	22	-

Sumber data : Subag. Umum, Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Desember Tahun 2023

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

## BAB II EVALUASI

### A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan IV tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
1	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)	70,28%	60,77 %	
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	85,00%	94,57%	
	<b>a.</b> Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 dok	100 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 dok	100%
	4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100 %
	6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100 %
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100 %
	<b>b.</b> Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel yang disusun	100 %	100%	100%
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	26 orang/bulan	100%
	2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	100 %

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang tersedia	1 laporan	1 laporan	100%
	4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15 dok	15 dok	100 %
	<b>c.</b> Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok	100 %
	2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok	100 %
	3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	2 Dok	2 Dok	100 %
	<b>d.</b> Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %
	2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100 %
	<b>e.</b> Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia	100%	100%	100%
	1) Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
	2) Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-
	3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
	<b>f.</b> Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik, dan air yang tersedia	3 laporan	3 laporan	100 %
	2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	3 laporan	3 laporan	100%
	<b>g.</b> Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%
	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	12 unit	100%
	2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Jenis	25 Jenis	100%
	3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	1 Jenis	100%

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	12 unit	100%
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	240 Perusahaan	1.878	782%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Penerimaan Misi penanaman modal	3 kali	7 kali	233 %
	1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dok	3 Dok	100%
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	52.000	76.286	146%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	52.000	76.286	146%
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	204 Pelaku Usaha	251 pelaku usaha	123%
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 kegiatan usaha	79 kegiatan usaha	131%
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah (%)	40%	60%	60%
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	-	-	-
	2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan (%)	100%	100%	100%
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan izin perizinan dan non perizinan	1300 izin	2621 izin	201%
	1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1300 izin (Pelaku Usaha)	1878 pelaku usaha	144%
	2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	13 Kegiatan Usaha)	13 Kegiatan Usaha	100%
	3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	100%

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	5	6	7	8	9
	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	100%	100%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	100%	100%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	15 Dokumen	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mencapai 95,57%. atau rata-rata **sangat baik** meskipun masih terdapat beberapa program/kegiatan yang belum terlaksana.

## B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2023 sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	5	6	7	8
1	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.244.109.850	3.174.498.335	97,85 %
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	23.680.000	94,72%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5.000.000	4.391.000	87,82 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100 %
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	3.000.000	2.289.000	76,30 %
	5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100 %
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100 %
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100 %
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.422.750.000	2.363.722.621	97,56 %
	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.409.750.000	2.350.722.621	98,19 %

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7	8
		2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	100 %
		3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	4.000.000	4.000.000	100 %
		4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	100 %
		<b>c.</b> Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100%
		1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.000.000	4.000.000	100%
		2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4.000.000	4.000.000	100%
		3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4.000.000	4.000.000	100%
		<b>d.</b> Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.216.900	262.216.900	100 %
		1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.006.900	10.006.900	100 %
		2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.100.000	5.100.000	100 %
		3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	247.110.000	247.110.000	100 %
		<b>e.</b> Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.722.000	10.722.000	100 %
		1) Pengadaan Aset Tak Berwujud			
		2) Pengadaan mebel			
		3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10.722.000	10.722.000	100 %
		<b>f.</b> Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.834.950	413.743.148	98,31 %
		1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	146.212.750	144.106.948	98,56 %
		2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	274.622.200	269.636.200	98,18 %
		<b>g.</b> Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.586.000	88.366.000	97,54 %
		1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.060.000	32,965.000	99,71 %
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	31.710.000	31.369.000	98,92 %
		3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.016.000	5.016.000	100 %
		4) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan	20.800.000	19.015.000	91,42 %
2.	Urusan Penanaman Modal	3. Program Promosi Penanaman Modal	340.000.000	339.437.200	99,83%
		Kegiatan Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	340.000.000	339.437.200	99,83%
		1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	339.437.200	99,83%
		4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	469.500.000	319.688.000,-	66,98 %

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	5	6	7	8
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	469.500.000	319.688.000,-	66,98 %
		1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	348.090.000	221.640.800,-	59,59 %
		2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	121.410.000	92.815.000,-	76,45 %
		5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000.000	48.321.900	96,64 %
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	50.000.000	48.321.900	96,64 %
		1) penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	48.321.900	96,64 %
		6. Program Pelayanan Penanaman Modal	71.932.000	71.695.800	99,67%
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	71.932.000	71.695.800	99,67%
		1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.938.000	44.732.500	99,54%
		2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	13.510.000	13.510.000	100 %
		3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	13.484.000	13.484.000	99,77 %
		4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-
		7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	7.992.000	7.992.000	100 %
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.992.000	7.992.000	100 %
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7.992.000	7.992.000	100 %

Realisasi anggaran Triwulan IV sebesar Rp. 3.956.374.035,- dari Jumlah anggaran Tahun 2023 setelah perubahan senilai Rp. 4.183.533.850,- sehingga Persentase rata-rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan IV tahun 2023 sebesar 94,57%.

### C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan IV tahun 2023 Sesuai tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023	Realisasi	Persentase Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PMPTSP	65,00 (B)	64,63	99,43%
			Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	65 (B)	60,77	93,49 %
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Dinas PMPTSP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	100 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas PMPTSP	72,50%	78,30	108,00 %
2	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1,50 %	494,77	329,84 %
			Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	6,00%	44,80
		Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional		10,00%	413,51	3.938,19 %
		Persentase peningkatan nilai investasi PMA		4,00%	857,5	21.437,5 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	84,00%	85,28	101,49 %

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI**

##### **A. PERMASALAHAN**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

1. Serapan anggaran Dinas PMPTSP sudah terbilang Sangat Tinggi yaitu 94,57% meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi 100% yang disebabkan oleh mekanisme penggunaan aplikasi perencanaan SIPD dan adanya Belanja ATK melalui aplikasi E-Katalog belum sepenuhnya dipahami oleh PPTK.

##### **B. REKOMENDASI**

Rekomendasi tindak lanjut untuk menghadapi masalah di atas adalah :

1. Perlunya peningkatan kompetensi PPTK terkait penerapan aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalog sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak salah rekening yang menyebabkan kendala pelaksanaan kegiatan.
2. Perlu adanya kepastian anggaran taktis bagi pemerintah daerah di awal tahun sehingga tidak terjadi refocusing anggaran pada pertengahan tahun.

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan/subkegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi di susun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada tahun berikutnya, terima kasih.

Benteng, 29 Desember 2023

  
Kepala Dinas PMPTSP,  
**Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660507 198603 1 022

# **LAMPIRAN**

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL



